BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian di Indonesia, karena dianggap telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan ekonomi serta memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja disuatu negara. Kekuatan utama ekonomi di Indonesia tidak serta merta terpaku pada investasi asing, UMKM juga menjadi pilar yang penting guna menyokong perekonomian bangsa ini. Dalam hal ini, masyarakat akan berperan sebagai penggerak atau pemeran utama, sedangkan pemerintah wajib mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan iklim usaha (Ridwan et al,2017). UMKM secara langsung membantu dalam proses pertumbuhan ekonomi masyarakat menengah kebawah di Indonesia. Segala kegiatan usaha UMKM ini secara tidak langsung telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia, hal ini berdampak secara signifikan terhadap pengurangan angka pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu, adanya UMKM ini harus tetap didukung dan terus dikembangkan karena usaha ini mempunyai potensi serta nantinya akan bermanfaat untuk keberlangsungan ekonomi negara.

Gambar 1.1

Diagram perkembangan UMKM di Indonesia periode 2018-2022

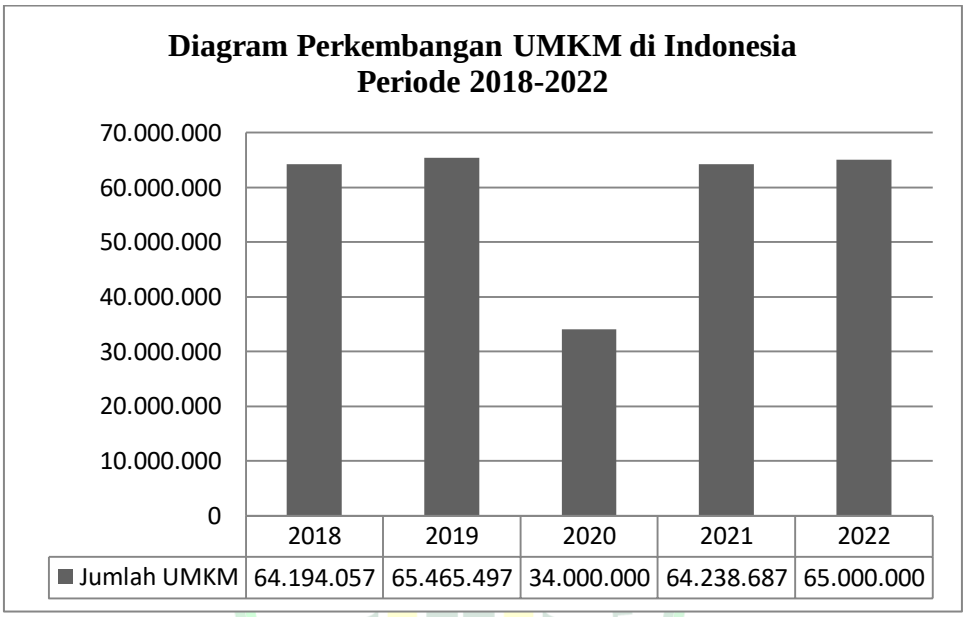

Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Indonesia dari 5 tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai 2022 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terkecuali pada tahun 2020, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang berdampak pada ketahanan sektor usaha UMKM di Indonesia. Menurut Ingratubun Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, jumlah UMKM diperiode 2020 mengalami penurunan yang drastis dikarenakan terjadinya pandemi covid menjadi 34 juta unit dari yang awalnya 64,7 juta di tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2021 UMKM meningkat sebesar 52% dan pada tahun 2022 jumlah UMKM di Indonesia kembali mengalami kenaikan sebesar 1,56%. (Republika.com).

Dengan bertambahnya jumlah UMKM di Indonesia dari tiap tahun akan sangat berpengaruh positif terhadap perekonomian di Indonesia. Akan tetapi, peningkatan-peningkatan tersebut juga harus didukung terhadap

kualitas UMKM yang ada, kualitas ini dapat dinilai dari adanya laporan keuangan UMKM itu sendiri. Laporan keuangan ini dibuat agar para pelaku UMKM dapat mengukur mengenai kinerja berjalannya usaha yang dilakukannya. Laporan keuangan juga memilki peran yang sangat penting bila disusun dengan baik dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Para pelaku UMKM bisa melakukan penyesuaian serta bertransformasi dengan segala perubahan yang sudah ada dalam standar yang telah berlaku agar mempermudahkan ketika pembuatan laporan keuangan. Namun hal ini terkadang tidak selaras dengan kenyataannya, umumnya UMKM menghadapi berbagai tantangan serta masalah tata pengelolaan keuangan, diantarannya tidak dapat membuat jurnal, penyusunan laporan keuangan serta pengelolaan pelaporan dan pengelolaan kas ataupun modal secara optimal dan wajar.

Berdasarkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, jumlah UMKM di Kabupaten Banyumas pada periode 2018 berjumlah 8.559, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5.754 dikarenakan pandemi covid 19. Sampai 2022 UMKM di Kabupaten Banyumas sudah kembali normal dengan angka UMKM sebesar 8.559. (Persada.com).

Berdasarkan berita yang peneliti kutip, pada saat pandemi covid 19 menjadi tamparan yang keras bagi para pelaku bisnis terutama UMKM, karena maraknya pandemi ini di Indonesia menyebabkan penurunan aset, penghasilan, serta tenaga kerja UMKM. Menurut data Dinas Koperasi Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022, penghasilan yang didapatkan pelaku UMKM sebelum pandemi mencapai Rp.763.568.394.551 dan pada saat terjadi pandemi pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp.122.233.403.830. Dengan penurunan ini, para pelaku UMKM perlu menerapkan SAK EMKM pada laporannya, karena dengan laporan keuangan yang baik, nantinya akan mempermudahkan ketika akan melakukan pengajuan modal kepada pihak pemberi modal. Hal buruknya, jika tidak

melakukan pelaporan keuangan yang baik tentunya akan menghambat kepada hal tersebut (Kabarnusa.com).

Tantangan para pelaku UMKM inilah yang menjadi perhatian utama terhadap para pelaku usaha dalam menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ada. Menurut Widiastoeti dan Sari (2020) UMKM merupakan entitas tanpa tanggung jawab publik yang penting, hal ini berarti entitas menerbitkan laporan keuangan dengan tujuan yang umum kepada pengguna diluar perusahaan, karena dalam perkembangannya, UMKM kini telah menyebar dan meningkat dengan melibatkan pihak eksternal dalam laporan keuangannya. Ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang akurat serta transparan mengenai kondisi usahanya kepada pihak eksternal. Hal ini juga yang menjadi daya tarik kepada para pihak eksternal terhadap usaha yang dilakukannya.

Laporan keuangan UMKM lambat laun semakin berkembang, saat ini sudah diterbitkan yang namanya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM). Menurut Purba et al, (2019) SAK EMKM merupakan standar akuntansi untuk suatu entitas yang tidak memiliki entitas publik atau tidak terikat dengan perusahaan lain *(independent)*. SAK-EMKM memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK karena ketentuan pelaporannya yang lebih kompleks. Adanya standar akuntansi ini maka para pelaku usaha UMKM mampu memberikan informasi keuangan yang lebih rinci mengenai kinerja manajemen usaha UMKM dimasa lalu dan bagaimana prospek kedepannya, anggota serta pihak eksternal dapat mengendalikan mengenai UMKM. Sejak diterbitkannya SAK ini berbagai pihak secara langsung memperlihatkan suatu kebenaran, efektivitas, dan keefisiensiannya dari standar baru ini. Akan tetapi, sangat disayangkan hal ini belum banyak diketahui oleh banyak pelaku bisnis UMKM dikarenakan kurangnya sosialisasi maupun pelatihan mengenai SAK EMKM dilingkungan para pelaku UMKM.

Bentuk SAK EMKM ini bisa dibilang sangat ringkas, namun tidak mengubah prinsip-prinsip yang umum digunakan pada saat ini. Kehadiran standar akuntansi keuangan ini menjadi referensi baru yang lebih baik dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang berlaku untuk umum. Menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan bukanlah perkara yang mudah bagi pelaku UMKM. Muchid (2015) yang menyatakan bahwa kendala yang dihadapi UMKM adalah dalam hal rendahnya pendidikan, minimnya tingkat pengetahuan dan teknologi informasi. Kendala ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Sutapa (2020) yang menunjukan bahwa hambatan UMKM untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai standar yang sudah ada diantaranya sumber daya manusia yang kurang kompeten dibagian keuangan dan hal ini jika dibiarkan akan berdampak negatif pada perkembangan UMKM, salah satunya adalah produktivitas menjadi rendah karena kurangnya modal serta akan mempersulit pihak pemberi modal melakukan analisis kelayakan dalam pemberian kredit kepada para pelaku UMKM.

Kota Purbalingga merupakan kota kecil yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Peluang investasi seperti UMKM dalam kota ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Dilansir dari Republika Online, sepanjang tahun 2021-2022 terdapat 34 UMKM asal Kota Purbalingga yang sukses menembus toko retail modern skala lokal. Hal ini belum termasuk deretan usaha lainnya yang sukses meraup berbagai keuntungan melalui *marketplace*. Melalui berbagai sistem strategi yang sudah tertata dan tentunya dukungan penuh dari pemerintah kabupaten, UMKM pada kota ini terus didorong untuk terus naik kelas. Bahkan, bisa dikatakan mereka mempunyai daya saing yang setara dengan pabrikan besar dan mampu menembus pasar ekspor. Salah satu UMKM yang ada di Kota Purbalingga yaitu UMKM Kars *Production* yang berada di Desa Bancar, Kecamatan Bancar. Fokus produksi dalam UMKM ini merupakan pembuatan wadah untuk penyimpanan bulu mata palsu.

Gambar 2.1

Diagram Rekap Penjualan di Tahun 2020

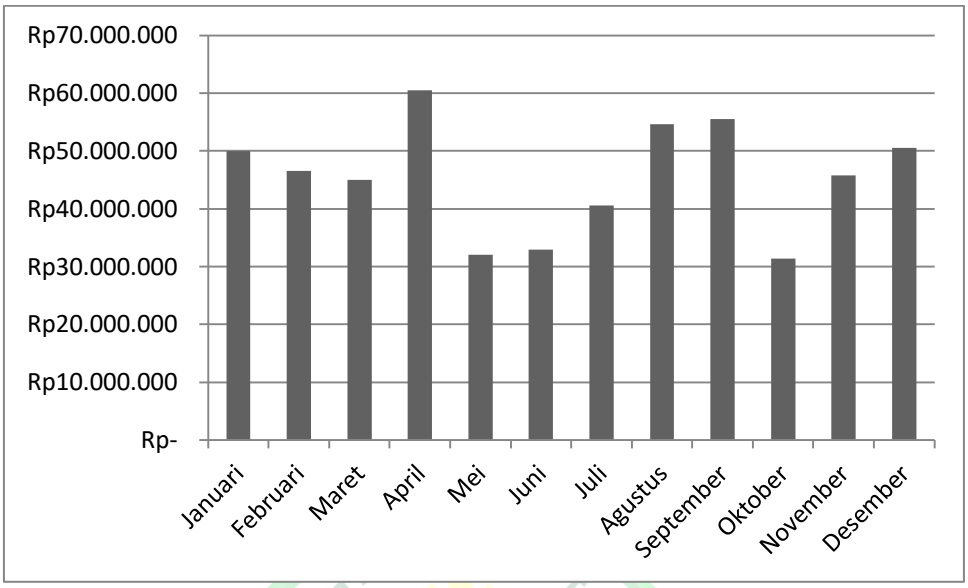

Sumber : UMKM Kars Production

UMKM Kars Production merupakan bisnis keluarga yang dikelola oleh keluarga bapak Karsono yang sudah berdiri sekitar 10 tahun dimulai dari tahun 2010. UMKM ini juga salah satu UMKM yang mampu bertahan pada saat pandemi covid 19 tahun 2020, dibuktikan berasarkan perkataan langsung yang diberikan oleh Bapak Karsono selaku pendiri UMKM ini. Menurutnya, *"Usaha ini pada saat pandemi covid 19 masih tetap berpoduksi walaupun aset penjualan menurut sekitar 40 an% dari penjualan biasannya"*. Berdasarkan keterangan diatas seharusnya UMKM Kars Production sudah menyusun laporan keuangan yang baik sehingga dapat memberikan manfaat untuk perkembangan usahannya. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti UMKM Kars Production guna menganalisis bentuk implementasi dan kesesuaian pada SAK EMKM dari proses pencatatan, penyusunan dan pelaporan keuangan di UMKM Kars Production.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Joni dan Manaroinsong (2023), menunjukan bahwa UMKM De Harvest menyusun laporan keuangan yang hanya mencakup pengakuan pendapatan dan pengeluaran dari hasil bisnisnya. Dari pelaporan pembukuan UMKM De Harvest tidak ada pemisahan antara pendapatan dan pengeluaran dalam laporan akuntansi, sedangkan standar akuntansi keuangan EMKM menjelaskan terdapat 3 komponen adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atass laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh UMKM De Harvest Tomohon secara sederhana dan untuk proses pembukuan yang masih dilakukan secara manual dan sangat berbeda dengan pelaporan pembukuan yang menerapkan SAK EMKM. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Novatiani et al, (2023) menyatakan bahwa implementasi SAK EMKM pada UMKM Kuliner di Kota Bandung sudah baik, hal ini didukung dengan penyajian laporan keuangan sederhana dan informasi akuntansi yang telah sesuai dengan SAK EMKM.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian mengenai implementasi SAK EMKM pada UMKM Kars Production, maka dari itu judul penelitian ini adalah **"Analisis Implementasi Pencatatan, Penyusunan, dan Pelaporan keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) (Study Kasus Kars Production)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana bentuk implementasi serta kesesuaian dari pencatatan, penyusunan dan pelaporan keuangan terhadap SAK EMKM pada UMKM Kars Production?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menganalisis bentuk implementasi serta kesesuaian pada SAK EMKM dari proses pencatatan, penyusunan dan pelaporan keuangan di UMKM Kars Production.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teroritis
   a. Secara teoritis dengan dibuatnya penelitian ini penulis mengharapkan hasil penelitiannya dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan implementasi penerapan SAK EMKM pada laporan keuangan UMKM.
   b. Hasil pada penelitian ini juga diharapkan berguna oleh para peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Perusahaan

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sarana referensi atau pedoman untuk perusahaan atau pelaku usaha meningkatkan kinerjannya.

   b. Bagi Penulis

      Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana penyumbangan pemikiran mengenai penerapan SAK EMKM pada laporan keuangan UMKM serta untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai materi penelitian ini.